

DAFTAR PUSTAKA

- Adminwarta. (13 Oktober 2016). *Pelajari Pengelolaan Keuangan, Badan Pengawas Nuklir Kunjungi Pemkot*. Diambil kembali dari Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta: <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5112>
- Asichin, M., & Rochwulaningsih, Y. (2018). Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945-1955. *Jurnal Indonesian Historical Studies*, 13-23.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Profil Kota Yogyakarta*. Diambil kembali dari <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/Profil-Kota-Yogyakarta>
- Goenawan, R., & Harnoko, D. (1993). *Sejarah Sosial Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Governmental Accounting Journal. (2017). Diambil kembali dari Jurnal Akuntansi Pemerintahan: akuntansi-pemerintahan.blogspot.com
- Martina. (7 Juni 2020). *Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual dan Contoh Cara Penerapannya*. Diambil kembali dari Ukirama: <https://ukirama.com/en/blogs/kelebihan-dan-kekurangan-akuntansi-berbasis-akrual-dan-contoh-cara-penerapannya>
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (n.d.). *Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta*. Diakses tanggal 27 April 2022, dari <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/page/index/struktur-organisasi>
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021. (n.d.). tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. (n.d.). tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (n.d.). tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2016. (n.d.). tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. (n.d.). tentang *Keuangan Negara.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.). tentang *Pemerintahan Daerah.*